BAB II

KEMISKINAN

A. Pengertian Kemiskinan

Secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda.[1] Kemiskinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai persamaan arti dengan kata kefakiran. Dua kata ini biasanya disebutkan secara bersamaan yakni fakir miskin yang berarti orang yang sangat kekurangan.[2] Di dalam kamus *lisānu al-'Arabi,* pengertian kata miskin dibedakan dengan kata faqir. Di sana dijelaskan bahwa kondisi miskin masih lebih baik bila dibandingkan dengan kondisi faqir. Faqir berarti tidak memiliki apapun sedangkan miskin masih memiliki sebagian harta.[3] Dalam bahasa Arab, kata miskin berasal dari kata *sakana* yang terdiri atas tiga huruf *sīn, kāf dan nūn* yang bermakna dasar diam atau tenang, sebagai lawan dari berguncang dan bergerak.[4]

Al-Qur'ān menggunakan beberapa kata untuk menggambarkan kemiskinan, antara lain dengan kata *faqīr*, *miskīn, al-sā'il,* dan *al-mahrūm*. tetapi, kata *faqīr* dan *miskīn* lebih sering dijumpai di dalam al-Qur'ān. di dalam al-Qur'ān kata *faqīr* dijumpai 12 kali dan kata *miskīn* dijumpai 25 kali, yang

---

[1]Lukman Ali dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Edisi kedua, cetakan ketujuh, (Jakarta: Balai Pustaka, 196), 660.
[2]Ibid., 220.
[3]Muhammad bin Mukarram bin 'alī, *Lisān al-'Arabi,* Vol. 5, (Beirut: Dār Ṣadir, 1414 H), 60.
[4]Departemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Pemberdayaan Kaum Duafa,* (Jakarta: Aku Bisa), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing digunakan dalam pengertian yang berbeda-beda.[5] Namun, al-Qur'ān sendiri tidak memberikan definisi yang rinci untuk istilah-istilah tersebut.

Beberapa kosa kata di dalam al-Qur'ān yang biasanya dimaknai dengan miskin mengindikasikan bahwa miskin adalah suatu kondisi dimana seseorang tersebut membutuhkan pertolongan. Dari pernyataan tersebut, miskin dapat dimaknai sebagai kondisi seseorang yang sedang membutuhkan bantuan dari orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok seperti kebutuhan akan makan dan minum.

Beberapa ahli mempunyai pemahaman yang berbeda-beda dalam mendefinisikan kemiskinan. Berikut definisi kemiskinan menurut beberapa ahli:

1. Benyamin White mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan adalah perbedaan kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat dari satu wilayah dengan wilayah lainya[6]
2. Parsudi Suparlan mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.[7]
3. Dalam konteks politik, John Friedman mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasikan basis kekuatan sosial

---

[5]Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam: Memangkas Kemiskinan, menodorong perubahan,* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 31.
[6]Dillon H.S dan Hermanto, *Kemiskinan di Negara Berkembang Masalah Krusial Global,* (Jakarta: LP3ES, 1993), 10.
[7]Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), x.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik, mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002).

Dilihat dari perspektif sosial, kemiskinan dimaknai sebagai kurangnya jaringan sosial dan struktur sosial yang mendukung seseorang untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan agar produktivitasnya meningkat. Dapat juga dikatakan bahwa, kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat, sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia.

Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok, sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain. Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi, kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggunaan tolok ukur yang berbeda-beda dalam menakar kemiskinan, menghasilkan pengertian yang berbeda pula tentang siapa saja yang pantas dikatakan miskin. Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, pemerintah menetapkan suatu standar bahwa yang termasuk golongan miskin adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok. Dalam konteks keindonesiaan, yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah beras. Seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhannya akan beras mereka digolongkan dalam kelompok miskin.[8]

Sajogyo membedakan standar perolehan beras bagi masyarakat pedesaan dan perkotaan. Di pedesaan, setiap penduduk masing-masing membutuhkan 20 Kilogram beras per bulan. Sedangkan di perkotaan, setiap penduduk masing-masing membutuhkan 30 Kilogram beras per bulan.[9] Adanya standar minimum perolehan beras ini berarti setiap penduduk yang sudah terpenuhi kebutuhan minimumnya akan beras yakni 20 sampai dengan 30 Kilogram per bulan, tidak lagi dikatakan miskin.

Selain menggunakan tolok ukur terhadap kebutuhan akan beras, pemerintah Indonesia juga menggunakan tolok ukur berdasarkan tingkat pendapatan per waktu kerja dalam satu bulan. Batasan tingkat pendapatan per waktu kerja adalah Rp. 30.000,- per bulan (dibuat pada tahun 1976/1977) atau

---

[8]Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen pemberdayaan ekonomi umat,* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 71.
[9]Sajogyo dan Jiwati Sajogyo, *Sosioogi Pedesaan,* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1983), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih rendah.[10] Seseorang yang berpenghasilan sekian atau kurang dari sekian dalam waktu satu bulan mereka tergolong miskin.

Bank dunia menetapkan mereka yang diebut sebagai penduduk miskin adalah mereka yang berpenghasilan kurang dari $5 per hari.[11] Jika dikurs-kan dalam rupiah justru rata-rata masyarakat yang paling miskin masih memiliki pendapatan dalam kisaran Rp. 50.000,- per hari. Jika standar ini ditetapkan di Indonesia maka jumlah penduduk miskin akan sangat banyak. Karena itu, Indonesia mempunyai standar tersendiri dalam menggolongkan kelompok miskin.

Al-Qur'ān tidak menjelaskan secara rinci mengenai tolok ukur yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang tersebut tergolong miskin atau tidak. Namun, secara garis besar dapat dipahami bahwa al-Qur'ān memberikan gelar miskin kepada seseorang yang tidak atau kurang memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan primer dalam kehidupannya.[12] Tolok ukur ini lebih umum dibandingkan dengan tolok ukur yang telah ditetapkan oleh beberapa tokoh di atas. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa setiap orang atau kelompok yang mempunyai potensi dan sudah mampu memenuhi kebutuhan primernya maka mereka tidak lagi dikatakan miskin.

B. Bentuk-bentuk Kemiskinan

Bentuk-bentuk kemiskinan menjadi beragam ketika dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Jika dilihat dari sudut pandang pendapatan, kemiskinan dibagi menjadi dua antara lain:

1. Kemiskinan Absolut

[10]Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan.,* xii.
[11]Muhtadi Ridwan, *Ekonomi Islam.,* 2.
[12]Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu: pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan

2. Kemiskinan Relatif

   Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya[13]

Selanjutnya jika dilihat dari sisi penyebabnya, kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kemiskinan Kultural

   Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

2. Kemiskinan struktural

   Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh sistem pembangunan yang tidak adil dan juga disebabkan oleh faktor-faktor rekayasa manusia[14]

C. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Kuncoro, penyebab kemiskinan antara lain sebagai berikut:

1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan

[13]Soedjatmoko, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan,* (Jakarta: LP3ES, 1995), 157.
[14]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.

2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah.
3. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal.[15]

Di bawah ini ada pula beberapa penyebab kemiskinan menurut pendapat Karimah Kuraiyyim antara lain:

a. Merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita secara global.
b. Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat.
c. Biaya kehidupan yang tinggi.
d. Pembagian *subsidi in come* pemerintah yang kurang merata.[16]

Ismawan mengutarakan bahwa penyebab kemiskinan dan keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Akibat keterbatasan dan ketertiadaan akses manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan dengan terpaksa apa yang saat ini dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat.[17]

Secara garis besar, faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat dikategorikan dalam dua hal sebagai berikut:

---

[15]Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan,* (Yogyakarta: AMP YKPN, 2003), 107.
[16]Ibid., 108.
[17]Bambang Ismawan, *Keuangan Mikro dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat,* (Jakarta: BKKBN, 2003), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu si miskin itu sendiri. Ketidakmampuan individu dalam melakukan usaha atau berkreatifitas, menjadikan hidup mereka miskin. Contoh ketidakmampuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
    a. Ketidakmampuan secara fisik misalnya cacat, kurang gizi, sakit-sakitan.
    b. Di bidang intelektual misalnya kurangnya pengetahuan, kebodohan, kekurangtahuan informasi.
    c. Keterbatasan mental emosional misalnya malas, mudah menyerah, putus asa temperamental.
    d. Kelemahan spiritual misalnya tidak jujur, penipu, serakah, tidak disiplin.
    e. Kondisi sosial psikologis yang kurang mendukung, misalnya kurang motivasi, kurang percaya diri, depresi atau stres, kurang relasi, kurang mampu mencari dukungan.
    f. Tidak berketerampilan misalnya tidak mempunyai keahlian yang sesuai dengan permintaan lapangan kerja.
    g. Tidak memilki asset misalnya tidak memiliki stok kekayaan dalam bentuk tanah, rumah, tabungan, kendaraan dan modal kerja.
2. Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu si miskin. Bentuk-bentuk pengaruh dari luar diri si miskin antara lain sebagai beriut:
    a. Terbatasnya pelayanan sosial dasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah
c. Terbatasnya lapangan pekerjaan formal dan kurang terlindunginya usaha-usaha sektor informal
d. Kebijakan perbankan terhadap layanan kredit mikro dan tingkat bunga yang tidak mendukung sektor usaha mikro
e. Belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan dengan prioritas sektor riil masyarakat banyak
f. Sistem mobilisasi dan pendayagunaan dana sosial masyarakat yang belum optimal seperti zakat
g. Budaya yang kurang mendukung kemajuan dan kesejahteraan
h. Kondisi geografis yang sulit, tandus, terpencil atau daerah bencana
i. Pembangunan yang lebih berorientasi fisik material
j. Pembangunan ekonomi antar daerah yang belum merata
k. Kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin

Faktor-faktor tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan individu, baik hubungan individu dengan diri individu itu sendiri, individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok yang dalam hal ini adalah dengan sesama masyarakat, ataupun hubungan individu dengan pemerintah.

D. Dampak Adanya Kemiskinan

Dari sekian faktor penyebab yang telah dipaparkan, memunculkan suatu permasalahan sosial yaitu kemiskinan. Dari satu permasalahan sosial saja yakni kemiskinan dapat memunculkan permasalahan-permasalahan sosial yang lain. Kemiskinan memberikan dampak sosial yang beraneka ragam mulai dari tindak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kriminal, pengangguran, kesehatan terganggu, dan masih banyak lagi. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh banyak pihak, tindakan-tindakan kriminal yang marak terjadi kebanyakan dilatarbelakangi oleh motif ekonomi yakni ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Selain maraknya tindak kriminal, kondisi kesehatan masyarakat yang buruk juga merupakan salah satu dampak dari adanya kemiskinan. Berikut rincian dampak yang terjadi akibat adanya kemiskinan:

a. Banyaknya pengangguran
b. Terciptanya perilaku kekerasan. Ketika seseorang tidak tidak lagi mampu mencari penghasilan melalui jalan yang benar dan halal dan ketika mereka merasa tidak sanggup lagi bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan
c. Banyak anak yang tidak mengenyam pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi membuat masyarakat miskin tidak lagi mampu menjangkau dunia sekolah atau pendidikan
d. Susahnya mendapatkan pelayanan kesehatan. Biaya pengobatan yang tinggi membuat masyarakat miskin memtuskan untuk tidak berobat. Sehingga, mereka sama sekali tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak[18]

Dampak-dampak yang telah disebutkan secara umum, dapat digeneralisir dalam beberapa aspek, antara lain:

[18]Mubyarto, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat,* (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Aspek Kependudukan

Dilihat dari segi kependudukan, kemiskinan berdampak pada ketidak merataan pertumbuhan peduduk di setiap wilayah sehingga ketidak merataan tersebut membawa konsekuensi berat kepada aspek-aspek kehidupan sosial lainnya. Secara nasional penduduk yang tidak merata mambawa akibat bagi penyediaan berbagai sarana dan kebutuhan penduduk. Dalam bidang lapangan pekerjaan terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan pertumbuhan lapangan kerja dan pada akhirnya menimbulkan pengangguran baik secara tersembunyi ataupun pengangguran secara terbuka.

b. Aspek Ekonomi

Masalah Ekonomi menyangkut masalah kerumahtanggaan penduduk dalam memenuhi kebutuhan materinya. Masalah ini terbagi kedalam beberapa aspek yaitu aspek kuantitas, kualitas penduduk, sumber daya alam dan manusia, komunikasi dan transportasi, kondisi dan lokasi geografi. Ditinjau dari segi kuantitas Penduduk Indonesia merupakan penduduk yang memiliki kekuatan ekonomi yang bisa dikembangkan terutama dengan jumlah penduduk yang banyak. Tapi kemiskinan menjadikan penduduk tidak memiliki kekuatan dalam mengembangkan perekonomian Indonesia. Kemudian kemiskinan menjadikan penduduk seolah menunjukan kelemahannya sebagai konsumen berbagai produksi.

c. Aspek Lingkungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah lingkungan dapat diartikan bahwa masalah yang terjadi di lingkungan hidup manusia mengancam ketentraman dan kesejahteraan manusia yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara komponan manusia dengan lingkungan yang menjadi penampung dan penjamin kehidupan manusia. Dampak lainnya yaitu keterbelakangan pembangunan, kebodohan, kebanjiran, pencemaran lingkungan dan tingkat kesehatan yang rendah yang diakibatkan karena lingkungan yang kurang mendukung karena kemiskinan.

d. Aspek Pendidikan

Pendidikan secara luas merupakan dasar pembentukan kepribadian, kemajuan ilmu, kemajuan teknologi dan kemajuan kehidupan sosial pada umumnya. Dampak kemiskinan terhadap pendidikan memang sangat merugikan sekali karena telah menghilangkan pentingnya pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga tidak sedikit penduduk Indonesia yang belum mengenal pendidikan.

e. Pemberontakan

Pemberontakan merupakan bentuk kekecewaan dari masyarakat terhadap pemerintah yang dinilai telah gagal menciptakan kesejahteraan rakyatnya, perang saudara antar-etnis, golongan, ideologi demi sebuah kekuasaan dan untuk menguasai kekuasaan, dan yang lainnya. Semua itu tidak terlepas dari usaha masyarakat untuk melakukan perubahan nasibnya agar menjadi lebih baik (sejahtera) dari keadaan kemiskinan yang menimpanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberontakan seperti itu biasanya terjadi di negara berkembang atau negara miskin.[19]

E. Teori-Teori Pengentasan kemiskinan

Pengentasan kemiskinan selalu menjadi agenda utama bagi negara-negara berkembang khususnya di Indonesia. Pengentasan kemiskinan selalu menjadi topik utama dalam setiap periode pemerintahan. Hal ini dikarenakan kemiskinan merupakan permasalahan yang menyangkut keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam rangka mengentas kemiskinan, Indonesia maupun negara-negara berkembang yang lainnya telah menggunakan teori-teori ekonomi yang ada, baik itu mengadopsi dari pemikiran barat maupun dari nasional sendiri. Teori-teori yang sudah digunakan maupun yang masih berupa wacana antara lain sebagai berikut:

1. Teori ekonomi neoliberal

   Neoliberalisme merupakan nomenklatur yang diciptakan dari luar. Istilah yang lebih sering dikenal adalah liberalisme. Neoliberaisme sendiri merupakan tahap selanjutnya dari liberalisme. Dalam pengertian luas, liberalisme adalah paham yang mempertahankan otonomi individu dari intervensi komunitas.[20] Kemudian muncul istilah liberalisme ekonomi yang pada kemudian hari disebut dengan neoliberalisme.

   Munculnya neoliberalisme dilatarbelakangi oleh kegagalan kebijakan ekonimi teknokratis dan intervensionis pada tahun 60-an yang

[19]Ibid., 21-30.
[20]Siti Aminah Caniago, *Munculnya Neoliberalisme sebagai Bentuk Baru Liberalisme.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang melahirkan ketidakpuasan dan konflik kepentingan.[21] Sehingga, sistem ini mensyaratkan dua hal, pertama meminimalisir intervensi negara dan kedua megakui kebebasan individu. Pada intinya paham ini memperjuangkan persaingan bebas yakni paham yang memperjuangkan hak-hak kepemilikan dan kebebasan individual. Mereka lebih percaya kepada kekuatan pasar untuk menyelesaikan masalaah sosial daripada regulasi negara.

Teori ini berhasil menurunkan inflasi dan mendorong perekonomian di beberapa negara. Seperti di Inggris pada pemerintahan Margareth Thatcher yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1979. Begitu juga pada kepemimpinan Ronald Reagan di Amerika Serikat dalam dua periode (1981-1989). Keduanya menerapkan sistem yang sama yakni privatisasi, deregulasi, serta pengurangan pajak dan subsidi.[22] Kesemuanya ini merupakan ciri dari neoliberalisme.

Kelebihan dari sistem ekonomi neoliberal ini antara lain adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena semua pihak bebeas untuk berinvestasi, tidak ada aturan yang mampu membatasi kemampuan investasi. Selain itu saya beli masyarakat ditingkatkan karena adanya stimulus, UMR naik dan kesenjangan sosial diperkecil.

Kelemahannya adalah minimnya kontrol pemerintah sehingga regulasi kurang. Pihak yang lemah akan semakin lemah dan yang kuat

[21]Ibid
[22]Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan semakin merajalela. Selain itu, masyarakat menjadi semakin konsumtif dan akhirnya terlilit hutang.

2. Teori ekonomi pancasila

Teori ekonomi pancasila adalah teori ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Teori ini bercirikan asas keselarasan dan lebih mengutamakan masyarakat dan bukan kemakmuran orang-seorang.[23] Penggunaan asas kekeluargaan bertujuan untuk meminimalisisir persaingan antar masyarakat. Sistem ekonomi yang telah digunakan seperti sistem kapitalis-liberal yang diajarkan oleh Adam Smith, menjadikan masyarakat bersaing secara bebas sehingga menimbulkan dampak kesenjangan sosial dan kemakmuran hanya dinikmati oleh orang-seorang.

Alasan Mubyarto menggunakan asas kekeluargaan adalah karena ia menganalogikan suatu sistem ekonomi sebagai suatu keluarga. Artinya, kemungkinan terjadinya persaingan antar anggota dalam suatu keluarga sangat kecil. Apabila antar anggota sudah mulai mempunyai semangat persaingan, maka pasti akan timbul keretakan hubungan antara yang satu dengan yang lain.[24] Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa persaingan akan tetap terjadi baik persaingan yang diiringi dengan suatu kerjasama maupun persaingan yang murni tanpa diiringi kerjasama.

Kemakmuran secara merata merupakan tujuan diberlakukannya ekonomi pancasila. Para pelaku ekonomi khususnya bagi para penguasa, diharapkan untuk tidak memikirkan kepentingan pribadi. Sistem

[23]Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintas pemikiran Mubyarto,* (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), 40.
[24]Ibid., 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perekonomian seperti inilah yang kemudian mampu meminimalisir permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

3. Teori Anggaran pro kaum miskin

Anggaran pro kaum miskin adalah penganggaran berdasarkan penilaian kebutuhan dasar masyarakat miskin dengan proses yang melibatkan kelompok miskin untuk ikut menentukan skala prioritasnya.[25] Dalam pengertian lain, anggaran pro kaum miskin dimaknai sebagai sebuah penganggaran yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat khususnya kelompok masyarakat miskin melalui proses yang adil, partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel.[26]

Teori ini menawarkan solusi penanggulangan kemiskinan dengan bertolak pada akar masalah kemiskinan itu sendiri. Definisi di atas menghasilkan sebuah pandangan yang melihat anggaran negara sebagai instrumen pemberdayaan. Sedangkan proses penganggaran itu sendiri dipandang sebagai proses politik di mana partisipasi kaum miskin mutlak diperlukan, sekalipun demokrasi perwakilan telah berjalan.[27] Untuk dapat memahami anggaran pro kaum miskin ini, tidak hanya soal logika anggaran dan penganggaran, tetapi juga memahami kemiskinan yang memiliki dimensi jauh lebih luas dari pada sekedar pendapatan yang rendah.

---

[25]Joe Fernandez, "Anggaran Pro Kaum Miskin: Konsep dan Praktik", dalam *Anggaran Pro kaum Miskin: Sebuah upaya menyejahterakan kaum miskin,* ed. Abdul Waidl dkk, (Jakarta: LP3ES, 2009), 15.
[26]Ibid
[27]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sentralitas peran anggaran dalam kehidupan publik menjadikan penentuan prioritas anggaran sudah semestinya melewati uji publik. Keterlibatan publik akan memberikan pertimbangan rasional untuk menghasilkan program program dan prioritas anggaran yang efisien, teapt sasaran, tepat waktu dan tentu saja legitimasi hukum yang lebih kuat.[28]

Upaya monitoring dalam pelaksanaan program ini juga sangat diperlukan. selama ini upaya-upaya monitoring dan audit sosial oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil terhadap program-program antikemiskinan di Indonesia masih belum tergarap dengan baik.[29] Upaya monitoring ini perlu dilakukan agar dapat diketahui dampak dari implementasi program dan siapa yang memperoleh manfaat dari iprogram tersebut. Tanpa audit sosial yang meninjau lebih jauh kemanfaatan program, maka masih sulit untuk menilai efektifitas program-program program-program pemberdayaaan dan bantuan bagi masyarakat miskin yang tercantum dalam APBN atau APBD.

Untuk mengetahui apakah penganggaran yang dilakukan pro kemiskinan atau tidak, dapat diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Tersedia mata anggaran yang khusus ditujukan untuk masyarakat miskin dalam menanggulangi keadaan darurat atau bencana

[28]Ibid., 20.
[29]Ibid., 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mengalokasikan dana langsung diterima oleh kelompok miskin dengan besar persentase yang proporsional sesuai dengan tingkat kemiskinan wilayah yang bersangkutan
c. Belanja kegiatan (berdasarkan kelompok target dan lokasi) program penanggulangan kemiskinan lebih banyak dari biaya operasional pelaksanaan program itu sendiri
d. Penetapan pagu indikatif anggaran dan skala prioritas yang terbuka nuntuk dicermati masyarakat.[30]

Dari sekian teori yang ada khususnya teori-teori yang sudah diterapkan, ternyata belum mampu memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Kemiskinan tetap menjadi permasalahan yang meliputi beberapa negara khususnya di Indonesia. Ketidakberhasilan tersebut bisa saja karena kesalahpahaman dalam pelaksanaan teori. Selain itu, bisa saja karena pada dasarnya sistem itu hanya mampu memperbaiki perekonomian masyarakat yang mempunyai kekuatan untuk meningkatkan perekonomiannya, sedangkan masyarakat yang jauh tertinggal dan tidak mampu mengikuti perjalanan sistem akan semakin tertinggal. Sehingga permasalahan baru yang muncul adalah kesenjangan sosial yang meningkat begitu tajam.

[30]Ibid., 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id